

KOMUNIKASI POLITIK DAN PERILAKU PEMIMPIN

Hamidi

Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract

Accelerating to achieve the vision, implementation of mission, the concept of leader or leadership, it is urgent for paying special attention to determine the quality of competition power. It does not overact if we suggest that the construction of leadership's communication has a strategic role. There are two postulates of strategic role. First is the dimension of "consideration". By this concept, a leader emphasizes to motivate in order the subordinates or members of group accomplish the task in achieving objectives. Further the leader maintains internal and external harmony and members' satisfaction. Second is the dimension of "initiating and directing". This concept primarily concerns with specifying ways and means for accomplishing the goals of the group and coordinating activities of several members by making policy, planning and executing.

PENDAHULUAN

Warga negara Indonesia dewasa ini di beberapa daerah sudah dan akan menentukan pilihan, terlibat dalam suatu proses menentukan jalannya pemerintahan. Pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) merupakan salah satu aplikasi komunikasi politik. Intensitas komunikasi politik dalam bentuk pemilihan umum mempunyai sejumlah fungsi bagi warga negara.

Aspirasi apa saja yang hendak disalurkan agar pejabat yang terpilih kemudian mempunyai kebijakan atau program seperti yang dikehendaki. Melalui pemilihan umum itulah rakyat juga akan menentukan kepada kandidat atau partai mana nantinya yang akan memegang tampuk pemerintahan di daerahnya. Di samping itu pemilihan umum bagi rakyat berfungsi sebagai media pelepasan ketegangan emosional dalam mengekspresikan kesetiaan kepada komunitas atau regim. Karena itu pemilihan umum sebenarnya memiliki dimensi yang terkait erat dengan kepercayaan, nilai dan harapan rakyat terhadap pemerintah.

Hasil suatu pemilihan umum baik langsung atau tidak, besar atau kecil selalu mempunyai pengaruh terhadap semua bidang kehidupan setiap warga negara. Pemilihan umum selain hendak menentukan calon kepala daerah atau presiden

mana nantinya yang akan memerintah, juga memilih anggota badan-badan perwakilan yang memenuhi prinsip-prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi. Kepada merekalah warga negara atau pemilih memberikan mandat yang selanjutnya mereka merumuskan kebijakan, program dan peraturan-peraturan yang nantinya harus ditaati oleh atau mengikat warga negara. Konsekuensinya adalah pelaksanaan kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan, bertambahnya kecerdasan, penegakan keadilan dan kualitas kemakmuran warga negara yang secara terencana harus diupayakan oleh pemerintah.

Dengan demikian pemilihan umum bukan hanya sebagai ritual lima tahunan tanpa memiliki arti penting bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan. Kesadaran dan pengetahuan mayoritas warga negara pemberi suara terhadap esensi makna pemilihan umum bahwa warga negara sebenarnya ”menyerahkan nasibnya” kepada sejumlah orang belum memadai, sehingga belum betul-betul terpilih putra-putra bangsa yang cerdas, amanah, komunikatif dan berakhlak terpuji.

Beberapa pemilu yang pernah dilaksanakan oleh bangsa ini baik secara nasional maupun lokal sebagai salah satu bentuk komunikasi politik telah melahirkan wakil-wakil rakyat dan pejabat pemerintahan yang masih banyak mengundang ekspresi publik berupa kritik, koreksi dan ketidakpuasan yang cukup berarti, karena para penyelenggara negara masih terlalu sibuk mempertahankan kekuasaan yang tercermin dari keputusan-keputusan yang lemah rasionalitasnya bagi tercapainya proses kemajuan bangsa. Penanggulangan krisis dalam berbagai bidang kehidupan masih sedang bergumul melawan pernyataan-pernyataan dan praktik-praktik korupsi, baik dalam bentuk persekongkolan antarkelompok maupun kolusi internal dalam satu kelompok, baik yang secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Di samping itu pelaksanaan pemilu masih melahirkan sumber daya pemimpin dan kepemimpinan yang masih rendah baik secara intelektual maupun moral, sehingga masih sering melahirkan sikap-sikap dan keputusan-keputusan dan perilaku politik yang sifatnya tidak terbuka, manipulatif, tidak jelas orientasi publiknya.

PILIHAN BERDASARKAN TUJUAN.

Untuk mengkaji lebih mendalam komunikasi politik khususnya tentang tindakan memilih pemimpin ada tiga perspektif umum tentang peran komunikasi dalam pemilihan umum (Nimmo, 1987).

Pertama, perspektif yang mengatakan bahwa pemilihan umum mengandung dimensi instrumental, dalam arti bahwa pemilihan umum merupakan media penting bagi pemberi suara untuk mencapai tujuan dengan seperangkat peraturan yang telah disepakati.

Perspektif *kehendak rakyat* ini mempunyai fokus kognitif, yakni tindakan pemberi suara dalam memilih didasarkan pengetahuan, pemikiran dan perhitungan tertentu dalam mencapai tujuan yang sudah sangat jelas. Pemberi suara dalam hal ini lalu mempunyai minat yang tinggi dalam mengikuti dan mengetahui isu-isu penting kampanye. Pemberi suara menurut teori ini dalam mencapai tujuannya melalui sejumlah tindakan politik, seperti misalnya mengikuti pemberitaan di media massa, terlibat atau memantau aktivitas kampanye, memberikan sumbangan materi dan pemikiran, bila telah ditemukan pilihan kandidat atau partai yang bisa menyalurkan aspirasinya. Dengan perkataan lain pemilih dengan karakteristik ini memilih kandidat atau partai tidak didasarkan karena dia adalah partisan partai atau kandidat tertentu, tetapi lebih didasarkan pada pilihan isu, kebijakan atau program apa yang ditawarkan oleh kandidat atau partai. Memilih satu di antara sejumlah kebijakan yang ditawarkan yang berbeda bahkan saling bertentangan, memerlukan tindakan intelektualitas.

Perspektif ini menegaskan bahwa pemilu sebagai sebuah proses komunikasi politik, yang mampu menggambarkan kehendak rakyat ini melahirkan asumsi-asumsi sebagai berikut.

Pertama, sebuah premis bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan siapa yang memegang tampuk pemerintahan dan kebijakan-kebijakan apa yang harus dibuat. Jika suatu bangsa memerlukan pemimpin, kemudian ditawarkan untuk memimpin maka semua kelompok pasti bersedia. Mereka tentu berebut mau menjadi pemimpin, sebab memimpin berarti berkuasa. Berkuasa berarti mendapat peluang besar untuk menentukan berbagai tercapainya kepentingan. Termasuk kepentingan meraup kekayaan. Dengan kekayaan tersebut penguasa terus mempertahankan, sedang pesaingnya juga berusaha merebut kekuasaan. Situasi seperti itu terus berlangsung sepanjang masa. Karena itu pemilihan umum merupakan salah satu cara yang dinilai tepat dan adil yang diterima semua pihak dalam upaya ”menghentikan” konflik-konflik. Proses perebutan kekuasaan tersebut dalam praktiknya cenderung merugikan rakyat. Pada hal sejak awal mereka mendapat mandat dari rakyat pemilih adalah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Kedua, bahwa kandidat atau partai akan mengambil sikap dan kebijakan sesuai dengan isu yang ditawarkan, sehingga pada waktu pemilihan umum para pemberi suara memilih isu yang bersesuaian. Jika misalnya publik tertentu tertarik dengan isu pembebasan uang sekolah para siswa, penegakan hukum terutama terhadap wajib atau pejabat pajak yang merugikan negara yang dilontarkan seorang kandidat, maka publik tersebut akan memilih kandidat tersebut. Di sinilah pentingnya seorang calon presiden atau kepala daerah ketika berkampanye dituntut kejelasan visi dan misinya, kebijakan atau program yang hendak dilakukan demi kepentingan yang menguntungkan rakyat. Semakin jelas atau transparan visi, misi, kebijakan dan program-programnya semakin menarik bagi pemilih, dengan konsekuensi semakin terikat kandidat tersebut untuk mampu memenuhinya kelak jika terpilih. Karena itu setiap misi, visi, kebijakan dan program seorang calon legislator, kandidat presiden atau kepala daerah secara administratif harus terarsipkan. Yang demikian sangat perlu karena selama ini para pejabat negara lebih mudah mengobral janji atau membohongi rakyat, mementingkan atau menikmati jabatan, dari pada berorientasi menjalankan mandat rakyat.

Ketiga, pemilih dengan demikian lalu diasumsikan oleh perspektif ini, menaruh perhatian, mengetahui, sadar akan isu-isu pemerintahan. Masa kampanye menurut asumsi perspektif ini sangat menentukan bagi pemilih yang berorientasi penawaran isu. Pemilih menurut perspektif ini akan memilih kandidat yang "janji-janjinya" sesuai dengan aspirasinya. Pemilih dalam hal ini tidak apriori kepada kandidat dari partai tertentu. Dengan demikian pemilih dengan tipe ini bisa saja pada pemilihan umum tahun tertentu memilih kandidat dari partai A dan pada pemilu berikutnya memilih kandidat dari partai B karena kesesuaian isu atau program yang ditawarkan kandidat tersebut dengan ide dan jalan-pikirannya (kognisi). Asumsi ini menuntut para kandidat peka akan permasalahan utama rakyat.

Keempat, perspektif kehendak rakyat ini menegaskan bahwa sebenarnya problem kehidupan yang dirasakan dan dialami oleh rakyat seperti yang didapat dari hasil survei secara sendiri akan menjadi problem yang harus dipecahkan oleh kandidat terpilih. Dengan demikian anggota lembaga perwakilan atau seorang pemimpin akan lebih mudah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi rakyat, sehingga pelaksanaannya lebih memperoleh dukungan masyarakat.

Asumsi terakhir menyatakan bahwa pandangan pemilih terhadap isu tidak berubah, sehingga sangat memungkinkan pejabat terpilih lebih mudah melakukan penyesuaian diri dengan kehendak para pemilihnya yang tidak berubah tersebut.

Sebagai sebuah teori atau perspektif yang pada umumnya memandang suatu objek dari sudut pandang tertentu, maka yang tampak jelas adalah aspek-aspek tertentu, sedang bagian-bagian lain belum tentu terpaparkan dengan sempurna, bahkan sangat mungkin lepas dari perhatian untuk dikemukakan. Ungkapan tersebut bisa melahirkan kritik bahwa tidak semua pemberi suara mempunyai orientasi isu, bahkan sebagian besar pemilih pun juga belum tentu. Di Amerika Serikat misalnya para peneliti sepakat bahwa pemberi suara sebagian besar adalah bukan pemilih yang berorientasikan isu, walaupun diakui pemberi suara dengan tipe seperti itu jumlahnya semakin meningkat.

PEMBERI SUARA BERSTANDARKAN IDEOLOGI.

Perspektif kedua mempresentasikan mekanisme kontrol rakyat. Perspektif ini menyatakan bahwa dalam pemilihan umum pemberi suara memilih siapa atau partai mana yang akan memerintah pada periode pemerintahan yang akan datang. Sesuai dengan namanya teori ini mempunyai fokus yang lebih evaluatif dari pada perspektif instrumental, lebih afektif (perasaan suka dan tidak suka) dari pada kognitif (ide, pikiran, logika dan rasionalitas).

Pemberi suara dalam perspektif kontrol rakyat ini lebih berorientasi kepada partai dalam arti bahwa : (1) Mereka memilih dalam pemilu dengan standar kepartaian dan ideologi. (2) Orang partai yang berkuasa dalam menjalankan pemerintahan baik dalam membuat kebijakan maupun dalam menjalankan program-program kerjanya, bisa dengan hasil evaluasi baik dan mungkin juga bisa jelek. Pada waktu pejabat menjalankan tugas itulah pemberi suara dapat melakukan koreksi, kontrol, kritik. Pemilih dalam hal ini aktif menjadi ” polisi ” bagi orang-orang partai yang berkuasa pilihan mereka. Terakhir, pemberi suara dengan demikian dapat menentukan siapa calon pejabat yang dapat diterima untuk menjalankan tugas atau siapa yang harus meninggalkan suatu posisi jabatan karena tidak mampu bekerja secara benar.

Pemilihan umum menurut perspektif kontrol rakyat ini merupakan komunikasi politik atau aktivitas penyampaian pesan (*messages*) untuk memilih pemerintahan, bukan untuk mengomunikasikan kebijakan atau memberikan mandat untuk

membuat program tertentu. Dari prinsip-prinsip tersebut perspektif kontrol rakyat mengandung asumsi tentang pemberi suara sebagai berikut.

Pemberi suara berkepentingan dan melibatkan diri dengan mencari informasi tentang tindakan pemegang jabatan partai dan perkembangan kebijakan pemerintah. Aktivitas tersebut dilakukan dengan kecenderungan yang cukup stabil terhadap satu partai politik yang menjadi pilihannya.

Kritik terhadap teori ini adalah bahwa jika terdapat cacat tindakan atau kelemahan yang sulit dibela dari partai dalam menjalankan tugas pemerintahan, ada kemungkinan besar pemberi suara tidak mampu mempertahankan kesetiaannya yang kemudian meninggalkan partai politik tersebut. Kesalahan yang fatal, misalnya pemimpin partai melakukan skandal atau korupsi berat. Mereka akan meninggalkan atau beralih dengan mengambil tindakan memilih partai atau kandidat berdasarkan isu atau berdasarkan kepentingan diri yang lain.

Di Indonesia kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian dana talangan kepada Bank Century, wakil rakyat yang berasal dari Partai Demokrat (pemerintah) dalam forum Panitia Angket Century ketika memanggil pejabat yang terkait dengan kebijakan tersebut, secara apriori mempertahankan dan membela kebenaran kebijakan pemerintah dalam memberi argumentasi, walaupun sebenarnya mereka secara individual tidak pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut. Di sini tampak jelas bahwa wakil rakyat dari Partai Demokrat termasuk pada warga atau pemimpin dalam perspektif dengan standar kepartaian, tetapi bukan berbasiskan ideologi.

PEMILIH YANG EXPRESSIVE DAN CATHECTIC.

Perspektif tentang pemberi suara yang ketiga adalah dukungan rakyat. Jika perspektif kehendak rakyat, pemilihan umum merupakan media untuk mengomunikasikan mandat kebijakan, dalam perspektif kontrol rakyat pemilihan umum adalah sarana awal untuk pengiriman *messages* persetujuan atau penolakan sebagai koreksi terhadap pemegang kekuasaan, maka dalam pandangan dukungan rakyat, pemilihan umum merupakan ajang mengomunikasikan kesetiaan dan kepatuhan kepada pemerintahan, komunitas atau prosedur politik.

Fokus perspektif dukungan rakyat ini adalah ekspresif, bukan merupakan instrumen atau media untuk melakukan evaluasi. Perspektif ini *cathetic* dalam arti bahwa fenomena pemilihan umum adalah sarana pemberian kekuatan

mental, bukan kognitif atau afektif. Fokus *cathectic* adalah berkaitan dengan pelepasan ketegangan emosional, frustrasi dan harapan, bukan bertindak untuk mencapai tujuan yang terang- benderang atau untuk mengekspresikan yang benar atau yang salah dalam pandangan moral.

Dengan demikian, perspektif ini di lapangan lebih mengutamakan peran propaganda, periklanan, pidato-pidato dalam kampanye dan demonstrasi yang lebih ekspresif untuk menggait dukungan rakyat atau mendukung pemerintahan yang ada. Tetapi artikulasi mereka memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap pembentukan kebijakan, alokasi keuntungan dan kerugian material dan pemilihan pemegang tampuk pemerintahan.

SEBUAH ANALISIS TEORETIK.

Rakyat Indonesia telah sepuluh kali melaksanakan pemilihan umum di samping beberapa kali pemilihan kepala daerah. Sekali pada tahun 1955 (Orde Lama), enam kali sejak 1971 sampai dengan 1997 pada Pemerintahan Orde Baru dan tiga kali pada 1999, 2004 dan 2009 (Era Reformasi). Yang menarik dari sepuluh kali pelaksanaan pemilihan umum tersebut adalah bahwa rata-rata 90 persen warga negara yang terdaftar sebagai pemilih berpartisipasi dalam arti menggunakan hak pilihnya, kecuali dalam era reformasi. Tahun 1955 mencapai 87,65 persen, tujuh pemilihan umum berikutnya di atas 90 persen, sedang di beberapa negara maju berkisar 60 sampai 80 persen.

Dari dua pemilihan umum pada tahun 1955 dan 1999 dengan partai yang berjumlah banyak (pada 1955 ada 28 partai dan pada 2004 diikuti oleh 24 dan partai), tetapi dinilai berlangsung cukup demokratis. Suasana kebebasan politik telah melahirkan banyaknya warga negara mendirikan partai sehingga jumlah partai yang ikut pemilihan umum pun demikian juga. Hal ini berakibat tidak satupun dari partai-partai tersebut yang bisa meraih suara lebih dari 50 persen. Gejala ini bisa merupakan indikator bergairahnya warga negara berpartisipasi dalam pemilihan umum atau menjadi pemimpin di negara ini, tetapi tidak diikuti oleh kesadaran mutlaknya kebersamaan di antara para pemimpin partai. Hasil pemilihan umum tahun 1955 misalnya, telah menimbulkan kemandekan proses kerja pemerintahan yang ditandai tidak adanya keputusan tentang penetapan dasar negara oleh Konstituante, yang akhirnya melahirkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yakni kembali memberlakukan UUD 1945.

Hasil pemilihan umum 1999 tidak sampai mengangkat calon dari partai pemenang pemilu, peristiwa ini juga menunjukkan ”tingginya kemampuan ”

membangun partisipasi dalam pemilu tetapi tidak disertai adanya kesadaran akan perlunya kebersamaan. Sikap para pemimpin bangsa atau pimpinan partai yang demikian ini berimbas pada atau justru merupakan refleksi sikap dan perilaku politik rakyat pada umumnya.

Dari pengalaman pemilu terakhir (2009) saja belum tampak secara jelas apa sebenarnya program utama yang hendak dilaksanakan partai-partai tersebut jika nanti memerintah. Bila demikian halnya maka suasana pemilihan umum dengan kampanyenya akan menutup kemungkinan bagi pemberi suara yang memiliki orientasi isu, pemilih yang hendak memberi mandat kebijakan. Pada hal sebenarnya pemilih yang demikian harus ditumbuh-kembangkan dalam masyarakat dalam program pendidikan politik oleh partai. Pemimpin partai yang tidak menyadari perlunya pemilih yang berorientasikan program dapat dipastikan bahwa pemimpin partai tersebut tidak mempunyai visi, misi dan program utama yang jelas jika nanti memerintah. Pemerintahannya hanya bersifat reaktif dan bila dirasakan tidak ada masalah (karena tidak punya visi yang jelas) maka yang dipikirkan adalah bagaimana bisa ” studi-banding-semu ” ke luar kota atau luar negeri.

Jika pemimpin partai telah memiliki visi, misi dan program yang konkret dan transparan, konsekuensinya adalah perlunya kemampuan bekerjasama dengan partai atau komponen bangsa yang lain dalam menjalankan tugas mewujudkan aspirasi bangsa. Jika telah memerintah, pemimpin partai dituntut memiliki kesadaran bahwa sebenarnya ada pemilih yang mempunyai orientasi ideologi atau partai-minded, tetapi harus diingat bahwa pemilih dengan karakteristik yang demikian memiliki daya kontrol yang cukup tinggi. Dari pada tokoh atau partainya dikecam oleh” orang lain ” lebih baik dikontrol sendiri sebelumnya. Karena itu penguasa (partai) dalam hal ini harus mempunyai kesiapan mental dan intelektual dalam menanggapi mereka. Pemilih dengan kesetiaan ideologi yang demikian ini juga perlu dilayani dan dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas lewat program yang terencana sebagai aktivitas pendidikan politik oleh partai.

Walaupun ada pemilih yang menilai bahwa pemilihan umum merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan, sehingga mereka berorientasikan isu, atau ada pemilih yang partai, ideologi dan tokoh-oriented, di lapangan bukan tidak mustahil terdapat pemilih yang *expressive* dan *cathectic* dalam arti mereka hanya menganggap pemilihan umum dengan kampanyenya sebagai suatu ritual politik yang menyenangkan, sebagai ajang pelepasan emosional

dan dukungan kekuatan mental belaka. Pemilihan umum bagi pemilih jenis ini dinilai bukanlah suatu komunikasi politik yang memiliki fungsi instrumental, evaluatif. Terhadap jenis pemilih sebagai penyemarak suasana pemilihan umum ini terutama saat kampanye, pemimpin partai perlu memberi respons dengan memberi pendidikan politik yang terprogram rapi, sehingga mereka lebih mengenal esensi pesta demokrasi sebagai ajang artikulasi aspirasi, transmisi kontrol sosial dan dukungan politis.

AKUTABILITAS PEMIMPIN DAN PEJABAT

Ketidak jelasan visi dan misi pemimpin bangsa masa kini, terutama kaburnya program kerja bisa disebabkan karena secara intelektual para pemimpin atau pejabat tidak visioner tidak mempunyai wawasan yang jelas yang dirumuskan dalam benak dan program yang terdokumentasi, sehingga mereka sebenarnya bukan menejer yang baik. Dalam menjalankan kepemimpinannya mereka tidak mempunyai target yang jelas baik target capaian secara kualitatif maupun kuantitatif, termasuk target waktu kapan suatu capaian harus sudah terwujud. Pejabat atau pemimpin seperti ini tindakan kepemimpinannya bersifat reaktif, tambal-sulam, tidak konkrit apa yang harus dilakukan dalam kesehariannya, sehingga lebih banyak memimpin dari belakang meja.

Dengan demikian sesungguhnya tugas dan kewajiban seorang leader atau menejer sangat berat jika tidak melekat dalam dirinya kemampuan intelektual yang memadai.

Ketidak jelasan visi dan misi pemimpin juga bisa disebabkan karena secara emosional para pemimpin bangsa dewasa ini dalam jiwanya tidak tertanam mencintai perilaku yang baik, menyayangi rakyat, keberadaan diri dan sosial yang ideal yang secara lahiriyah tampak dalam kesehariannya.

Keberadaan visi dan misi yang tidak jelas yang minim program kerja konkrit tersebut menghasilkan banyak pemimpin dan pejabat lebih suka bicara yang abstrak seperti pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, pada hal yang dikehendaki rakyat pemilih adalah tindakan nyata mewujudkannya.

Kelemahan Fatal Pemimpin dan Pejabat. Jika perencanaan tertentu (baca : standar) dan program telah dirumuskan dalam berbagai bentuk perundangan dan peraturan dan pelaksanaannya dilakukan (sesuai dengan pesan-pesan kampanye), kebanyakan para pemimpin dan pejabat hanya berhenti sampai di

situ, pada hal yang tidak kalah pentingnya adalah melanjutkan dengan tindakan kontrol atau pengawasan pelaksanaan, apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum.

Bila kita menginginkan yang direncanakan terwujud menjadi kenyataan dalam waktu tertentu, maka tindakan pengawasan sangat menghajatkan adanya tim pengawas. Individu atau anggota tim pengawas harus punya kualifikasi orang atau orang-orang yang berani, tidak cukup hanya menguasai perundangan dan peraturan, karena hasil pengawasan bisa dalam bentuk kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan dan sebaliknya ketidaksesuaian atau adanya penyimpangan dan pelanggaran yang bisa merugikan unit kerja secara khusus atau negara, baik menyangkut citra dan reputasi, maupun secara kekayaan materiil negara. Pengawas memerlukan keberanian karena hasil pengawasannya bisa berupa pernyataan-pernyataan berdasarkan data yang bersifat negatif bagi individu yang diawasi.

Temuan pengawasan harus ditindaklanjuti baik secara apresiatif bagi yang menunaikan tugas dengan baik, tetapi juga tegas memberi hukuman terhadap mereka yang melakukan penyimpangan. Menindaklanjuti hasil pengawasan terkadang sudah melibatkan unit-unit kerja yang lain yang juga memerlukan tindakan yang adil baik dalam bentuk *reward* maupun *punishment*.

Menjadi pejabat atau pemimpin pengawasan yang berani dan menjadi penindak lanjut hasil pengawasan yang tanpa rasa takut, bangsa ini masih terkategori bangsa yang *lembék* (*soft nation*). Para pengawas dan penindak lanjut (baca: pemimpin, pejabat) hasil pengawasan masih dihindangi rasa takut, bukan hanya rasa takut kepada orang-orang yang diawasi yang melakukan pelanggaran, tetapi kebanyakan takut dan sangat takut tidak bertambah kekayaan materinya, apa lagi jika yang diawasi masih satu instansi. Solidaritas korps lebih diutamakan bukan kebenaran walaupun pahit untuk dinyatakan.

Selama bangsa ini masih dipimpin oleh kebanyakan para pemimpin yang *lembék*, yang masih takut tidak bertambah secara mendadak kekayaan materinya, masih lebih mementing diri dan kelompoknya maka keterpurukan dalam berbagai bidang yang sering diartikulasikan, maka selama itu pula rakyat menunggu dalam kecemasan.

Tak ada yang baru dalam paparan tentang bagaimana para pemimpin atau pejabat yang sudah terpilih harus berani bersikap dan bertindak sebagai *leader* dan *menejer* yang sebenarnya, tetapi yang memerlukan kebaruan adalah lahirnya pemimpin atau pejabat bangsa ini yang tidak munafik, yakni satunya

pengetahuan, keyakinan dan tindakannya, sehingga lahir pemimpin baru yang penyandang akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dexter, Louis Anthony, 1989. *The Sociology and Politics of Congress*, Chicago, Rand McNally.
- Edelmen, Murray, 1974. *The Symbolic Uses of Politics*, Urbana, University of Illinois Press.
- Ginsberg, Benjamin, 1996. Election and Public Policy, *American Political Science Reviews*, Vol. 70 : 41 – 49.
- Key, V.O. Jr. , 1984. *The Responsible Electorate*, Urbana, University of Illinois Press.
- Marbun, B. N., 2003. *Bagaimana Memenangkan Pemilu*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Nimmo, Dan, Political Communication and Public Opinion in America, terj. , tujun Surjaman, 1989. *Komunikasi Politik*, Bandung , Remadja Karya.
- Schumpeter, Joseph A. , 1962. *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York, Harper Torc.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.